

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber referensi yang dapat menunjang penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Efektivitas Perencanaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Nanda Dias Ekaputra 2021, Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk.	Efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen RPJMD yang sudah ada dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan	Perbedaan: Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya yaitu efektivitas penggunaan aplikasi terhadap kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan sedangkan di penelitian ini berfokus pada implementasi SIPD terhadap efektivitas perencanaan anggaran Persamaan: Memiliki variabel yang sama yaitu

		Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.	efektivitas SIPD.
Muhammad Irfan Nasution Dan Nurwani, 2021, Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	BPKAD kota medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah kota medan	Perbedaan: Dalam penelitian tersebut menggunakan teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Stewardship. Persamaan: berfokus pada Implementasi SIPD.
Afrilia Bella Karundeng, Johannis E. Kaawoan, dan Sofia E. Pangemanan, 2021, Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Implementasi Kebijakan SIPD	Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini.	Perbedaan: Dalam penelitian tersebut membahas tentang implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD sedangkan dalam penelitian ini membahas efektivitas perencanaan anggaran di SIPD. Persamaan: Memiliki variabel yang sama yaitu Implementasi SIPD terhadap perencanaan

			anggaran.
Maitsarana Ishmaturahwa, Sulaiman, Rita Martini, M. Thoyib, dan Kartika Rachma Sari, 2021, <i>Evaluation of Regional Financial Management Based on Local Government Information Systems</i>	<i>Evaluation of SIPD</i>	<i>There are no derivative rules and more detailed guidelines related to the use of SIPD in regional financial management, as well as the unpreparedness of the system itself.</i>	Perbedaan: Dalam penelitian ini membahas tentang SIPD terhadap pengelolaan anggaran keuangannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang SIPD terhadap perencanaan anggaran. Persamaan: Memiliki variabel yang sama yaitu SIPD

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Stewardship Theory

Menurut Said (2015) *Stewardship theory* merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donalson dan Davis, 1989, 1991 dalam Raharjo, 2007). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya,

karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).

Sedangkan menurut Susetyo (2009) dalam Septiputri (2013) dalam teori stewardship diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimalkan utilitas kelompok manajemen dan memaksimalkan utilitas kelompok ini dan pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut. Teori stewardship dapat menjelaskan bahwa organ yang terdapat dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai (Septiputri, 2013).

Pemerintah bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan LKPD yang baik sebagai pihak yang memiliki banyak informasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengaktualisasi diri sebagai pegawai pemerintah yang patuh (Khasanah dan Rahardjo, 2014).

Berdasarkan teori tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi SIPD sehingga akan menciptakan efektivitas perencanaan anggaran pada OPD setempat salah satunya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

2.2.2 Teori E-Government

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pabilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sedangkan dalam buku E-Government In Action (2005:5) menguraikan E-Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;

- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana E-Government tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa E-Government adalah upaya untuk penyelenggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengimplementasian SIPD pada setiap OPD digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah lebih efektif dan efisien.

2.2.4 Implementasi SIPD

2.2.4.1 Sistem Informasi

Sistem informasi menuntut hampir seluruh aktifitas, organisasi dan program kerja di berbagai aspek kehidupan untuk dipelajari dan implementasikan. Sistem informasin nyatanya menjadi alat penyedia informasi yang paling cepat dan akurat untuk mendukung mencapai tujuan suatu entitas dan organisasi. Sistem informasi dikatakan mencapai keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut

dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi dengan baik, tetapi juga dilihat dari kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan. Sistem informasi pada kenyataannya sudah menggunakan teknologi yang canggih, akan tetapi sistem belum bisa dikatakan berhasil bila pemakai sistem tersebut tidak dapat menerima atau bahkan kesulitan dan enggan untuk menggunakannya. (Jogiyanto, 2005)

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan melaporkan informasi untuk para pengguna yang berkepentingan terhadap perusahaan. (Krismiaji, 2020)

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (*garbage*).

Dari definisi sistem informasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah sistem yang ada pada teknologi informasi yang digunakan oleh manusia yang dikumpulkan dan dianalisa untuk mendapatkan informasi agar tujuannya tercapai dalam mengambil keputusan.

2.2.4.2 Definisi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008)

2.2.5 Efektivitas

2.2.5.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran

tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selain itu, Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Hidayat (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

2.2.5.2 Indikator Efektivitas

Adapun kriteria atau indikator mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978:77) dalam Roos Yulastina dan Ach. Andiriyanto (2018) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Tangkilisan (2015:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

Selain itu, ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini (2007:55):

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Tangkilisan (2015:64) adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.2.6 Perencanaan Anggaran

2.2.6.1 Definisi Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan. Perencanaan ialah suatu proses penentuan

tujuan organisasi yang kemudian menyajikannya dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat/bisa mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh (Suandy, 2011).

Menurut Tjokroamidjojo dalam Syafalevi (2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014:90).

Menurut Hasibuan dalam Syafie (2007) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara

maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

2.2.6.2 Definisi Anggaran

Anggaran merupakan paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2019).

Mardiasmo, (2016) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Mulyadi, (2016) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Mardiasmo, (2016) anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana public dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut Mardiasmo, (2016), anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: 1) anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*); 2). anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*); 3). anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*); 4). anggaran sebagai

alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*); 5). anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*); dan 6). anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*).

Sementara menurut Rudianto (2009; 16), menyatakan bahwa anggaran mempunyai dua fungsi yaitu: 1). alat perencanaan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan (*planning*), anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan.; 2). alat pengendalian. Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai penilaian aktifitas setiap bagian organisasi sesuai rencana atau tidak.

Kemudian menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:70) dalam Manajemen Organisasi Sektor Publik, anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) anggaran sebagai alat perencanaan, dapat membantu organisasi untuk menetapkan kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan; 2) anggaran sebagai alat pengendalian, memberikan rincian tentang pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat mengendalikan pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*); 3) anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, membantu menentukan kebijakan fiskal yang diambil untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) anggaran sebagai alat politik, menilai komitmen pengelola (eksekutif) dan kesepakatan legislatif dalam melaksanakan program- program yang telah dijanjikan; 5) anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan

dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya; 6) anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dapat digunakan untuk menilai seberapa besar pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran; dan 7) Anggaran sebagai alat motivasi, dapat digunakan untuk memotivasi manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisiensi dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.2.6.3 Definisi Perencanaan Anggaran

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk (Mardiasmo, 2009): a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya. c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatanyang telah disusun, dan d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen

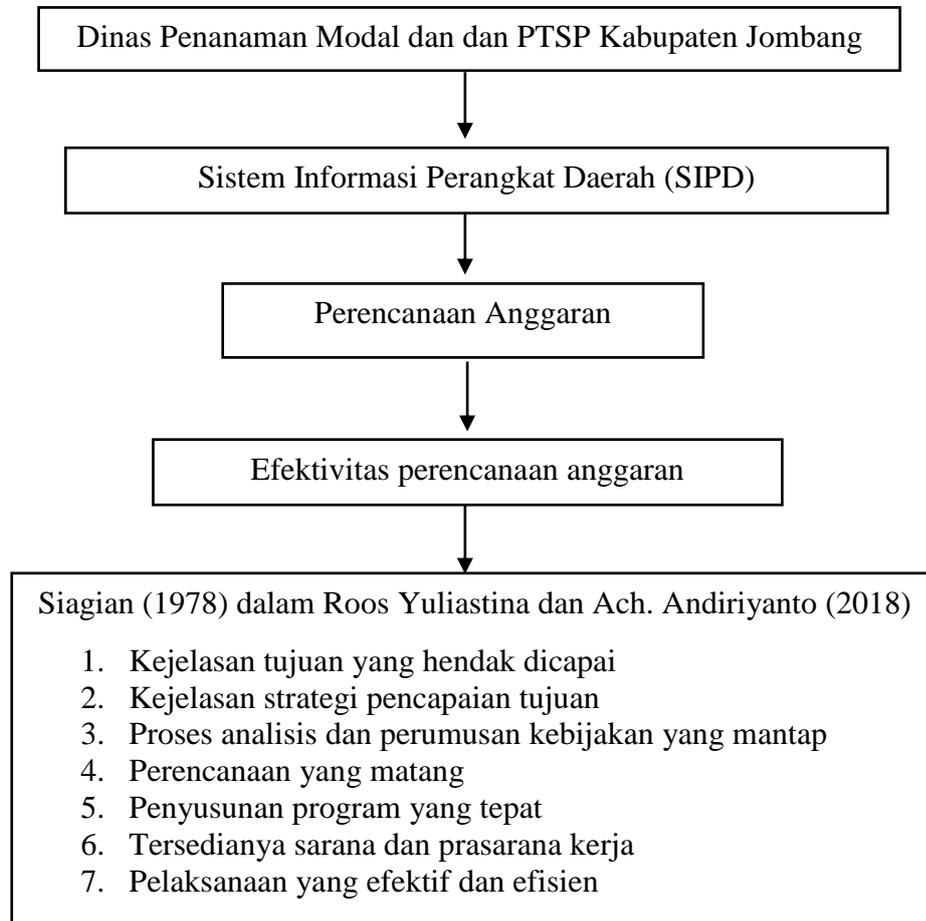
dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016).

Secara sederhana perencanaan anggaran dapat diartikan bagaimana mendapatkan uang dan mengalokasikannya sehingga penggunaan dana untuk tindakan pada masa yang akan datang akan tepat sasaran.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti mengambil tempat penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang yang ingin dicapai yakni implementasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) terhadap efektivitas perencanaan anggaran, didalam efektivitas perencanaan anggaran mengukur seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai. Adapun kriteria atau indikator mengenai pencapaian tujuan efektif perencanaan anggaran atau tidak yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, dan pelaksanaan yang efektif dan efisien (Siagian, 1978 dalam Roos Yuliastina dan Ach. Andiriyanto, 2018)

Dari penjabaran kerangka konseptual diatas, dapat digambarkan secara jelas pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual